



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDI HAMZAR
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA
3. NHK : 60489

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.100.540.000**

1. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 100.140.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 450.100.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 450.100.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 400.100.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/100 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 700.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **181.300.000**

1. MOBIL, SUZUKI KATANA JEEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 79.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 99.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.400.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **103.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 2.386.240.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.386.240.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.